

**DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PADA 15 KABUPATEN DENGAN IPM TERENDAH
DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2024**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STARATA SATU DALAM EKONOMI SYARIAH**

**DISUSUN OLEH:
KHOIRUR ROMADONI**

22108010034

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

**DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PADA 15 KABUPATEN DENGAN IPM TERENDAH
DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2024**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STARATA SATU DALAM EKONOMI SYARIAH**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**DISUSUN OLEH:
KHOIRUR ROMADONI
22108010034**

**PEMBIMBING;
DHIYAUL AULIA ZULNI, M.E.
NIP. 19951109000002101**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-392/Un.02/DEB/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA 15 KABUPATEN DENGAN IPM TERENDAH DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUR ROMADONI
Nomor Induk Mahasiswa : 22108010034
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dhiyaul Aulia Zulni, M.E.
SIGNED

Valid ID: 69afba2220792



Penguji I

Prof. Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
SIGNED

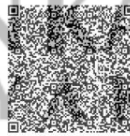
Valid ID: 69ae608ab97bd



Penguji II

ANGGARI MARYA KRESNOWATI, M.E.
SIGNED

Valid ID: 69af8a70f38fc



Yogyakarta, 06 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
SIGNED

Valid ID: 69afce6e078c6

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Khoirur Romadoni

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DI-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoirur Romadoni

NIM : 22108010034

Judul Skripsi : Determinan Indeks Pembangunan Manusia pada 15 kabupaten memiliki IPM terendah di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2024

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2026

Pembimbing



Dhiyaul Aulia Zulni, M.E.
NIP. 19951109000002101

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirur Romadoni

NIM : 22108010034

Jurusan/Program Studi: Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi berjudul “**Determinan Indeks Pembangunan Manusia pada 15 kabupaten memiliki IPM terendah di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2024**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *body note* dan daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 24 Februari 2026

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Khoirur Romadoni

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirur Romadoni

NIM : 22108010034

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

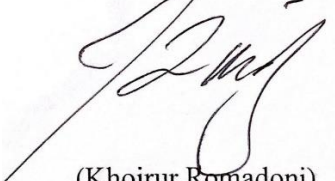
“Determinan Indeks Pembangunan Manusia pada 15 kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2024”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal: 24 Februari 2026



(Khoirur Romadoni)

HALAMAN MOTTO

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya jika teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”

-Khoirur Romadoni-

“Disaat kamu merasa berada difase yang membuatmu terpuruk maka disitulah dirimu mulai terbentuk”

-Khoirur Romadoni-

“Nasib tidak bisa diduga, takdir tidak bisa dirubah, tapi doa dalam usaha bisa merubah segalanya, *nothing is impossible when Allah said KUN FAYAKUN*”

(Ust. Hannan Attaki)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamiin. Penulisan karya ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya yang senantiasa diberikan hingga saat ini.

Karya ini saya dedikasikan sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, yang menjadi pintu surga bagi saya. Terutama kepada Ibu sebagai cinta pertama dalam hidup saya, serta Bapak yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, motivasi, doa dan kasih sayang dengan penuh keikhlasan.

Tidak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri, Khoirur Romadoni yang telah bertahan sejauh ini dan tidak pernah berhenti berdoa dan berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah SWT, atas tumpahan kasih sayang serta anugerahnya yang menjadikannya mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sangat lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini merupakan proses yang panjang, sarat dengan tantangan dan pelajaran berharga. Berkat limpahan rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan karya akhir dengan judul **“Determinan Indeks Pembangunan Manusia pada 15 Kabupaten dengan IPM Terendah di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2024”**. Pencapaian ini tentunya bukan hasil usaha penulis semata, melainkan juga berkat dukungan, doa, dan kontribusi positif dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis bermaksud mengungkapkan penghargaan serta rasa terima kasih sebesar-besarnya pada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos. L, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dhiyaul Aulia Zulni, M.E., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi telah menyisihkan waktu dan bersabar dalam memberikan bimbingan terkait keterbatasan pengetahuan penulis, serta menyampaikan masukan yang memfasilitasi penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Muh Rudi Nugroho, S.E., M.Sc., sebagai Dosen Penasihat Akademik telah memberikan berbagai bimbingan dan saran yang sangat berharga dari awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat baik selama proses perkuliahan.

7. Segenap pegawai dan staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu administrasi selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua, atas doa yang tak pernah putus dan sayang yang tulus, perhatian, dan dukungan yang menjadi pilar utama kekuatan penulis dalam menjalani proses pendidikan. Tentunya semua jasa dari kedua orang tua, tidak akan mampu penulis balas sedikitpun dalam bentuk apapun dan dengan hati yang sangat tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
9. Saudara tercinta, Mohammad Rosi, yang terus-menerus memberikan dorongan, inspirasi, dan bantuan total kepada penulis sepanjang tahap penyusunan hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada diri sendiri, Khoirur Romadoni. Penghargaan yang paling tinggi atas upaya gigih dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih atas ketahanan yang telah ditunjukkan hingga saat ini, tetaplah sebagai orang yang berkomitmen untuk berusaha, maju lebih jauh, dan tidak pernah lelah dalam menjalani tantangan.

Demikianlah, atas segala doa dan dukungan dari berbagai pihak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga karya tulis ini jadi dasar pertama bagi kajian-kajian mendalam di masa mendatang. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan kritis dan saran konstruktif sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas di waktu yang akan datang. Pada akhirnya, semoga kontribusi sederhana ini mampu memberikan nilai tambah dan berkontribusi terhadap kemajuan bidang ilmu pengetahuan. Diharapkan langkah ini bisa jadi permulaan yang mengarah pada masa depan yang gemilang. *Aamiin*.

Yogyakarta, 24 Februari 2026

Penulis



Khoirur Romadoni

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| ABSTRACT | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 17 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 18 |
| D. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA | 21 |
| A. Landasan Teori..... | 21 |
| B. Kajian Pustaka..... | 38 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 44 |
| D. Pengembangan Hipotesis..... | 45 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 52 |
| A. Jenis Penelitian..... | 52 |
| B. Populasi dan Sampel..... | 53 |
| C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data..... | 53 |
| D. Definisi Operasional Variabel..... | 54 |
| E. Metode Analisis Data..... | 60 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 70 |

| | |
|---|------------|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 70 |
| B. Analisis Statistik Deskriptif | 72 |
| C. Pemilihan Model Regresi Data Panel | 75 |
| D. Analisis Uji Asumsi Klasik | 76 |
| E. Analisis Uji Hipotesis | 79 |
| F. Pembahasan..... | 83 |
| BAB V PENUTUP | 92 |
| A. Kesimpulan | 92 |
| B. Saran..... | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN | 101 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Data capaian komponen IPM pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur..... | 8 |
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu | 39 |
| Tabel 2. 2 Perbedaan Penelitian | 43 |
| Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel..... | 54 |
| Tabel 4. 1 Luas wilayah dan jumlah penduduk pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur (km ²)..... | 71 |
| Tabel 4. 2 Hasil Analisis Deskriptif | 72 |
| Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow..... | 75 |
| Tabel 4. 4 Hasil Uji Hausman | 76 |
| Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinieritas | 77 |
| Tabel 4. 6 Hasil Uji Parsial (t) model FEM | 79 |
| Tabel 4. 7 Hasil Uji Simultan (f) model FEM | 81 |
| Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²) model FEM..... | 82 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Data IPM Indonesia tahun 2017-2024 | 3 |
| Gambar 1. 2 Data IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2024 | 5 |
| Gambar 1. 3 Data kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Jawa Timur | 7 |
| Gambar 1. 4 Upah Minimum 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur | 10 |
| Gambar 1. 5 TPAK 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur..... | 11 |
| Gambar 1. 6 PDRB perkapita 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2024 | 13 |
| Gambar 1. 7 Persentase Kemiskinan 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur..... | 15 |
| Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran..... | 44 |
| Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas | 78 |



ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai indikator yang mencerminkan taraf hidup manusia pada setiap daerah. Walaupun capaian IPM nasional meningkat konsisten setiap tahunnya dari tahun 2017-2024, akan tetapi IPM pada tingkat regional masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Provinsi Jawa Timur menunjukkan ketimpangan IPM di setiap daerahnya antara daerah-daerah maju dan daerah tertinggal. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis determinan IPM pada 15 kabupaten memiliki IPM terendah di Provinsi Jawa Timur, yaitu Blitar, Bojonegoro, Trenggalek, Pasuruan, Tuban, Pacitan, Bondowoso, Situbondo, Jember, Pamekasan, Probolinggo, Lumajang, Sumenep, Bangkalan dan Sampang. Variabel independen yang dianalisis meliputi upah minimum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, PDRB perkapita serta kemiskinan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder, yang dimana data tersebut didapatkan dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2017-2024. Regresi data panel merupakan Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dan terdapat tiga model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Model terbaik yang digunakan adalah FEM dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum, TPAK dan PDRB perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, sedangkan Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Tingginya nilai R-Squared membuktikan bahwa keempat variabel bebas tersebut mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap IPM secara besar. Temuan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pembangunan manusia khususnya pada 15 kabupaten dengan capaian IPM terendah di Provinsi Jawa Timur, karena daerah-daerah ini paling membutuhkan perhatian yang khusus.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, PDRB Perkapita, Kemiskinan, Regresi Data Panel

ABSTRACT

The Human Development Index is defined as an indicator that reflects the standard of living of humans in each region. Although the achievement of national HDI has increased consistently every year from 2017-2024, HDI at the regional level still shows significant inequality. East Java Province shows HDI inequality in each region between developed and disadvantaged regions. The purpose of this study was to analyze the determinants of HDI in 15 districts with the lowest HDI in East Java Province, namely Blitar, Bojonegoro, Trenggalek, Pasuruan, Tuban, Pacitan, Bondowoso, Situbondo, Jember, Pamekasan, Probolinggo, Lumajang, Sumenep, Bangkalan dan Sampang. The independent variables analyzed included the minimum wage, labor force participation rate, GDP per capita and poverty. The approach of this research is quantitative by utilizing secondary data, where the data is obtained from BPS from 2017-2024. Panel data regression is an analysis technique used in this study and there are three models, namely Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM). The best model used is FEM and the results of the study show that minimum wage, TPAK and GDP per capita have a significant positive effect on HDI while Poverty has a significant negative effect on HDI. The high R-Squared value proves that the four independent variables are able to explain their influence on HDI in a large way. These findings are expected to be considered by the government in formulating effective and targeted policies to improve human development, especially in the 15 districts with the lowest HDI achievement in East Java Province, because these areas need special attention the most.

Keywords: Human Development Index, Minimum Wage, Labor Force Participation Rate, GDP Per Capita, Poverty, Panel Data Regression

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan didefinisikan sebagai tahapan yang dirancang untuk meningkatkan seluruh dimensi kehidupan. Oleh karena itu, setiap negara secara berkelanjutan mengimplementasikan inisiatif pembangunan yang tidak hanya terbatas pada lingkup bangsa dan wilayah, namun juga mencakup partisipasi masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang merata (Wandirah & Setyono, 2024). Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan keberlanjutan. Pengetahuan dan inovasi teknologi harus dioptimalkan sesuai dengan kapasitas negara. Lebih lanjut, pembangunan wajib memperhitungkan perkembangan dinamika global (Ratnasari et al., 2019). Pembangunan juga dapat dipahami sebagai sebuah inisiatif untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, bentuk perwujudan pembangunan dapat dilihat dari berbagai perubahan yang membawa kontribusi positif dalam memperbaiki status masyarakat (Garnella et al., 2020).

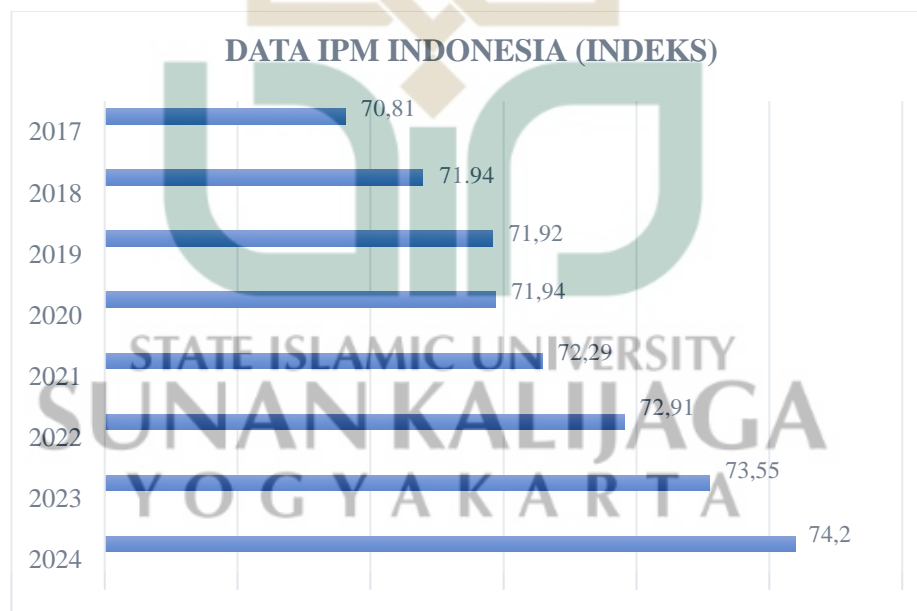
Demi terealisasinya tujuan nasional, pemerintah berkewajiban melaksanakan pembangunan di setiap wilayah guna mengimplementasikan cita-cita bangsa. Sebagaimana diuraikan dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu aspirasi bangsa Indonesia adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan peningkatan kecerdasan bangsa. Kesuksesan pembangunan nasional tidak semata-mata diukur dari pesatnya ekonomi, namun yang lebih krusial adalah kemampuannya dalam menaikkan taraf hidup dan kapabilitas

sumber daya manusia (Imelda et al., 2021). Amartya Sen berpendapat bahwa pembangunan berorientasi pada penempatan manusia sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima pasif. Menentukan tujuan serta mengarahkan proses yang berdampak pada kehidupan mereka merupakan peran dari manusia. Kesuksesan pembangunan diindikasikan oleh peningkatan kapabilitas dan perluasan kedaulatan, yang merupakan inti dari pembangunan berbasis manusia (Indarti, 2017).

Sebagai landasan dalam menyusun berbagai kebijakan penting, konsep pembangunan manusia fokus pada upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat secara utuh. Upaya ini mencakup penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta penyediaan lingkungan yang mendukung keberlanjutan hidup yang layak. Untuk membentuk masyarakat yang lebih sejahtera, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (BPS, 2025). BPS (2021) menegaskan bahwa sumber daya manusia merupakan kekayaan hakiki suatu negara. Kunci kemajuan suatu bangsa terletak pada penciptaan lingkungan yang kondusif bagi warga negara untuk mencapai harapan hidup yang tinggi, kondisi kesehatan yang baik, serta mampu menjalani kehidupan yang produktif dan berkesinambungan merupakan kunci dari kemajuan pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan proses jangka panjang, yang menempatkan pembangunan di sekeliling manusia dan bukan manusia yang justru di sekeliling pembangunan (BPS, 2021).

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia, *United Nation Development Programme* (UNDP) telah mengeluarkan suatu

indikator yaitu *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan tolak ukur dalam pencapaian pembangunan disuatu daerah (Hasibuan et al., 2020). Indeks ini mulai diperkenalkan UNDP ditahun 1990, dan kemudian secara rutin diterbitkan pada laporan tahunan yang berjudul *Human Development Report*. Kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak merupakan tiga dimensi utama yang menjadi tolak ukur IPM. Harapan hidup saat lahir digunakan untuk mencerminkan dimensi kesehatan, sedangkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah digunakan untuk mengukur dimensi pendidikan. Selain itu, dimensi terakhir yaitu standar hidup layak yang ditaksir melalui pengeluaran perkapita (Sapaat et al., 2020).



Gambar 1. 1 Data IPM Indonesia tahun 2017-2024

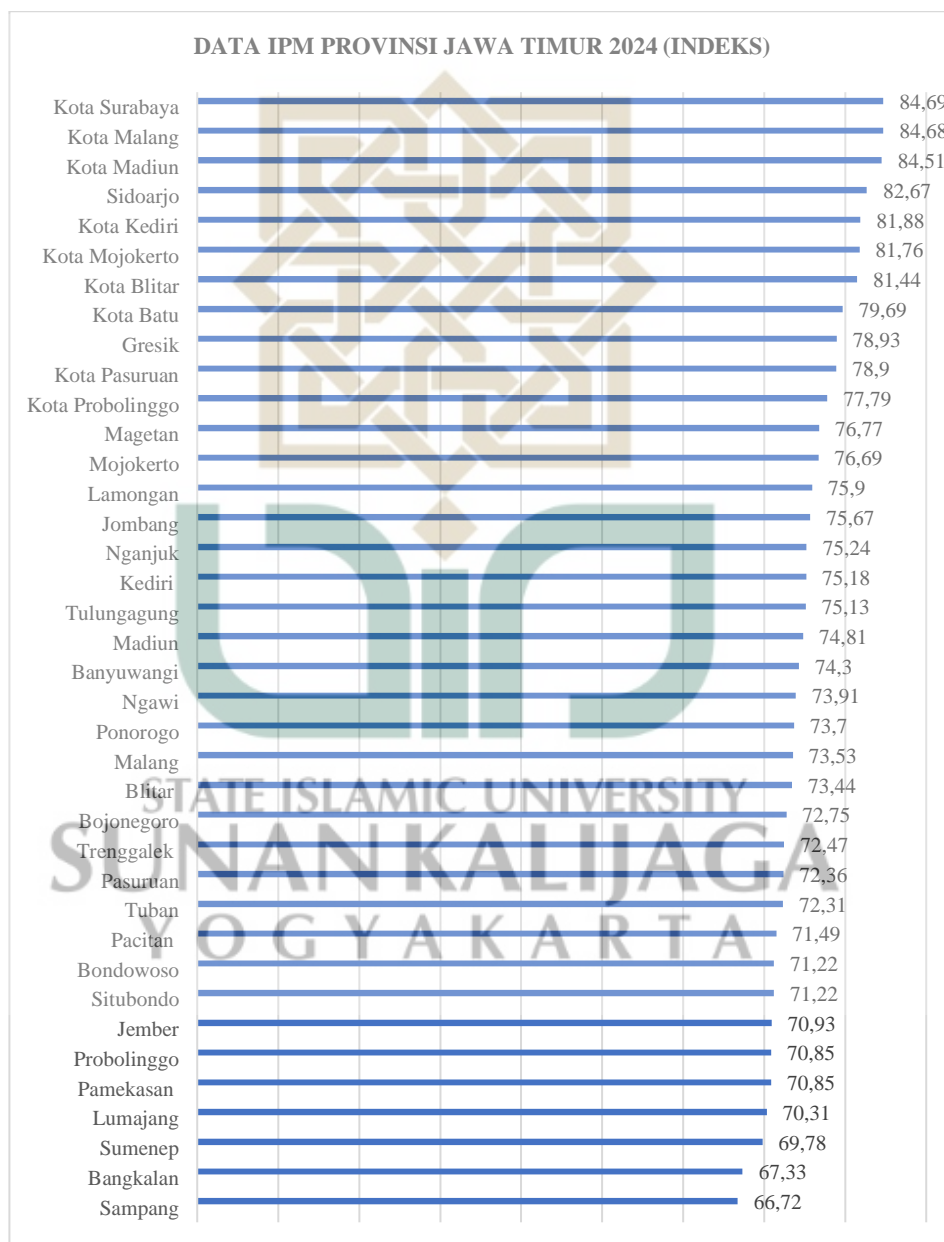
Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2017–2024 pada gambar grafik 1.1, terlihat bahwa kualitas pembangunan manusia nasional menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2019, IPM Indonesia berada pada nilai indeks 71.92 dan meningkat sedikit

menjadi 71.94 pada tahun 2020, dikarenakan ditahun itu Indonesia dihadapkan oleh pandemi Covid-19. Kenaikan kemudian berlanjut pada tahun 2021 dengan nilai indeks 72.29, yang mencerminkan mulai pulihnya berbagai sektor setelah mulai redanya pandemi Covid-19. Tahun 2022 mencatat kenaikan signifikan menjadi 72.91 dan arah peningkatan ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Menurut BPS, peningkatan IPM diperkuat oleh seluruh komponen dasarnya yang meliputi pengetahuan, kesehatan dan umur panjang, serta standar hidup layak. Peningkatan berkelanjutan dalam IPM menunjukkan perbaikan akses layanan dasar serta peningkatan produktivitas masyarakat (BPS, 2025).

Indonesia menjadikan pemerataan serta peningkatan IPM sebagai prioritas dalam kebijakan nasional. Peningkatan akses pendidikan melalui program merdeka belajar serta perluasan layanan kesehatan melalui BPJS merupakan fokus utama pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Manatahu, 2025). Namun capaian pembangunan yang diharapkan melalui kebijakan tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada tingkat regional, Provinsi Jawa Timur memperlihatkan perbedaan IPM yang sangat menonjol antar kabupaten/kota. Hal ini menjadi perhatian mengingat menurut Sunarsip (2025), Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta, yang didukung oleh kuatnya kinerja sektor industri pengolahan serta besarnya peran sektor perdagangan, dimana tingginya kontribusi perdagangan didukung oleh potensi bisnis yang berkembang melalui perdagangan domestik dan internasional seiring dengan

solidnya sektor industri. Namun tingginya kontribusi ekonomi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pemerataan capaian IPM, sehingga ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah di Provinsi Jawa Timur masih tergolong cukup lebar.

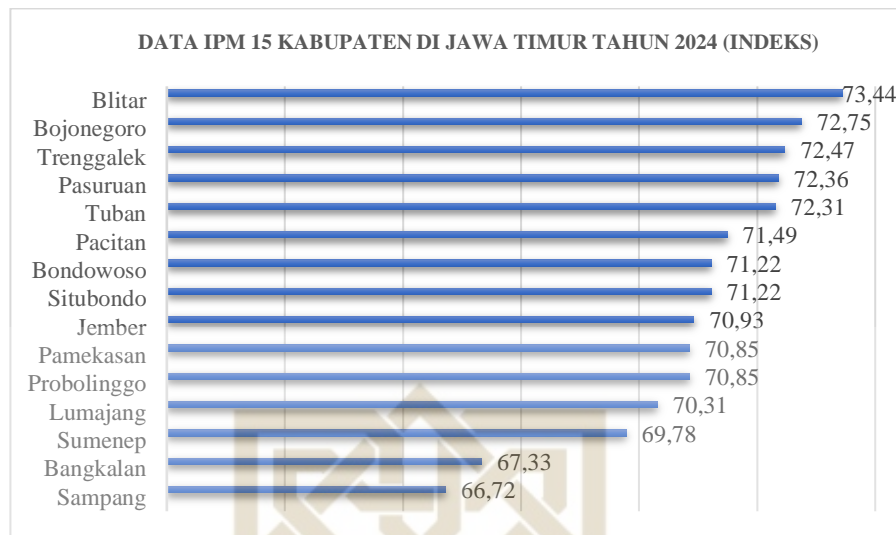


Gambar 1. 2 Data IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa beberapa daerah maju seperti Kota Madiun, Kota Malang, Kota Batu dan Kota Surabaya mencatat capaian IPM yang tinggi, berbeda halnya dengan daerah seperti Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Bondowoso yang secara konsisten berada pada kelompok terbawah di Provinsi Jawa Timur. Wahyudi (2021) mengatakan menurut data IPM bahwa daerah-daerah pedalaman, kepulauan, pesisir pantai dan juga jauh dari Ibu Kota Provinsi umumnya memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia terendah di provinsi tersebut (Wahyudi, 2021).

Menurut Manatahu (2025), capaian Indeks Pembangunan Manusia di tingkat nasional yang naik, tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan manusia telah tercapai. Dengan pemeriksaan yang lebih mendalam, terdapat disparitas yang signifikan antarwilayah, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan hambatan geografis (Manatahu, 2025). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa belum meratanya peningkatan kualitas hidup manusia di seluruh wilayah. Menurut BPS (2024), terdapat 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang secara konsisten berada di posisi 15 kabupaten dengan capaian IPM terendah di Provinsi Jawa Timur selama dua tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2023-2024. Daerah-daerah tersebut didominasi oleh kabupaten-kabupaten yang berada di Pulau Madura dan wilayah Tapal Kuda, yang menunjukkan tantangan terbesar dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan membutuhkan perhatian khusus.



Gambar 1. 3 Data kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 1.3, terlihat bahwa kabupaten-kabupaten dengan IPM terendah mayoritas dikuasai oleh daerah yang memiliki kondisi pembangunan yang relatif tertinggal. Kabupaten Sampang menempati posisi IPM terendah dengan nilai indeks 66.72, diikuti Kabupaten Bangkalan dengan nilai indeks 67.33 yang menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi. Kondisi ini menggambarkan adanya permasalahan dalam pemenuhan dimensi dasar IPM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Untuk itu, masih diperlukan komitmen dan kerja keras yang lebih dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas modal sumber daya manusia.

Rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rendahnya pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak masyarakat di daerah tersebut yang merupakan dimensi penyusun dari IPM. Berikut ini merupakan data mengenai capaian komponen-

komponen IPM pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2024.

Tabel 1. 1 Data capaian komponen IPM pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur

| Kabupaten | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | Umur Harapan Hidup (Tahun) | Pengeluaran Perkapita (Juta) |
|-------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Blitar | 7.87 | 12.67 | 75.32 | Rp 12.020 |
| Bojonegoro | 7.59 | 13.18 | 74.91 | Rp 11.204 |
| Trenggalek | 7.92 | 12.63 | 75.35 | Rp 10.872 |
| Pasuruan | 7.46 | 12.78 | 74.61 | Rp 11.617 |
| Tuban | 7.53 | 12.54 | 74.95 | Rp 11.579 |
| Pacitan | 7.90 | 12.69 | 74.74 | Rp 10.099 |
| Bondowoso | 6.53 | 13.33 | 73.31 | Rp 11.689 |
| Situbondo | 6.93 | 13.20 | 73.36 | Rp 11.216 |
| Jember | 6.54 | 13.50 | 74.17 | Rp 10.700 |
| Pamekasan | 7.17 | 13.69 | 73.66 | Rp 9.811 |
| Probolinggo | 6.31 | 12.64 | 73.93 | Rp 12.258 |
| Lumajang | 7.27 | 12.41 | 74.57 | Rp 10.124 |
| Sumenep | 6.10 | 13.59 | 73.86 | Rp 10.156 |
| Bangkalan | 6.01 | 11.98 | 73.43 | Rp 9.841 |
| Sampang | 5.08 | 12.55 | 73.66 | Rp 9.782 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2024

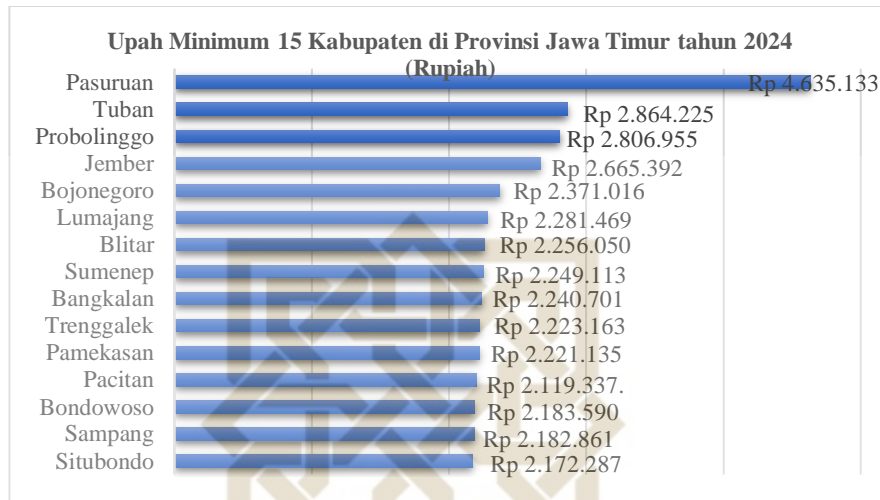
Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa dimensi pendidikan yang tercermin dalam rata-rata lama sekolah sebagian besar kabupaten memiliki nilai yang relatif rendah, bahkan terdapat kabupaten dengan capaian dibawah 6 tahun seperti Kabupaten Sampang yang memiliki rata-rata lama sekolah 5.08 tahun. Menurut Wahyudi (2024), rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut tidak terlepas dari tingginya angka putus sekolah, yang ditandai dengan minimnya rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk (Wahyudi, 2024). Capaian dimensi kesehatan yang tercermin dalam umur harapan hidup pada 15 kabupaten tersebut berada dikisaran 73-75 tahun dan pengeluaran perkapita yang juga masih berada di tingkat pengeluaran yang relatif rendah. Pengeluaran perkapita pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur tersebut berada dikisaran sekitar Rp 9 juta-Rp 12 juta pertahun, yang menunjukkan

bahwa tingkat daya beli masyarakat di daerah tersebut masih tergolong rendah.

Menurut Mankiw, capaian Indeks Pembangunan Manusia dapat dipengaruhi oleh tingkat upah. Mankiw dalam teori upah efisiensi mengungkapkan bahwa tingkat upah tidak secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, karena kenaikan upah memungkinkan pekerja untuk memenuhi standar kehidupan yang lebih tinggi dari pada angka batas kehidupan layak (Kusuma et al., 2025). Penelitian Nailufar et al (2024) juga mengatakan bahwa kenaikan tingkat upah akan memperbaiki tingkat kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan yang diterima, yang selanjutnya memastikan pemenuhan standar hidup yang memadai secara lebih optimal, serta memungkinkan individu untuk memperoleh akses ke layanan kesehatan yang lebih bermutu dan lebih lama mendanai pendidikan (Nailufar et al., 2024).

Dalam pemenuhan kualitas hidup, peran upah sangatlah penting sebagai bagian dari penghasilan masyarakat. Kenaikan upah minimum akan memfasilitasi individu untuk mencapai kehidupan yang memadai. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan terkait upah minimum, termasuk melalui instrumen regulasi. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 yang membahas Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1 menetapkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas pengupahan yang memadai guna memenuhi kebutuhan dasar manusia. Upah minimum ditetapkan sebagai mekanisme perlindungan sosial untuk menghindari penurunan upah. (Pratama & Ariza, 2024). Kecukupan upah memungkinkan seseorang menjaga kesehatan dan mengakses layanan pendidikan lebih baik serta meningkatkan standar

hidup. Berikut ini merupakan Upah Minimum tahun 2024 pada 15 kabupaten memiliki IPM terendah di Provinsi Jawa Timur.

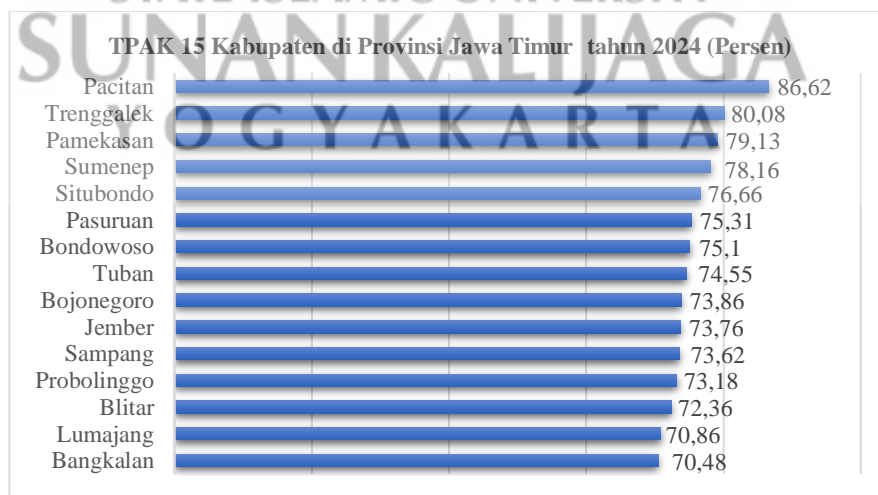


Gambar 1. 4 Upah Minimum 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pada gambar 1.4, terlihat bahwa pada setiap kabupaten memiliki tingkat upah minimum yang berbeda-beda. Kabupaten Pasuruan menempati posisi dengan upah minimum tertinggi sebesar Rp 4.635.133, sedangkan Kabupaten Situbondo berada di posisi terendah sebesar Rp 2.172.287 dan diikuti Kabupaten Sampang dengan upah minimum sebesar Rp 2.182.861. Rata-rata kisaran upah minimum pada kabupaten-kabupaten tersebut berada dikisaran Rp 2.200.000 yang bisa dibidang tergolong rendah. Faizin (2021) mengatakan bahwa upah yang tidak mencukupi sering kali membatasi kapasitas daya beli masyarakat, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses layanan fundamental seperti pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, disparitas antarwilayah turut memperburuk kesenjangan yang lebih luas dalam taraf kehidupan manusia (Faizin, 2021).

Selain itu, Lewis mengungkapkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong capaian Indeks Pembangunan Manusia. Teori Lewis (1954) menegaskan tenaga kerja yang berlebih tidak menjadi rintangan dalam proses pembangunan. Bahkan, surplus pekerja dapat berperan sebagai modal untuk mendorong peningkatan pendapatan dalam memperbaiki kualitas hidupnya (Lestari & Nilasari, 2025). Menurut Faujiah & Istiandari (2025), semakin tinggi jumlah penduduk usia produktif yang berpartisipasi di pasar tenaga kerja, semakin signifikan pula kontribusi mereka terhadap produktivitas wilayah dan pendapatan keluarga. Situasi ini akhirnya meningkatkan akses pekerja atau individu terhadap layanan kesehatan, Pendidikan serta peningkatan standar hidup yang memadai. Dengan demikian, secara keseluruhan hal ini mendorong perbaikan kualitas pembangunan manusia (Faujiah & Istiandari, 2025). Berikut ini merupakan capaian TPAK tahun 2024 pada 15 kabupaten memiliki IPM terendah di Provinsi Jawa Timur.



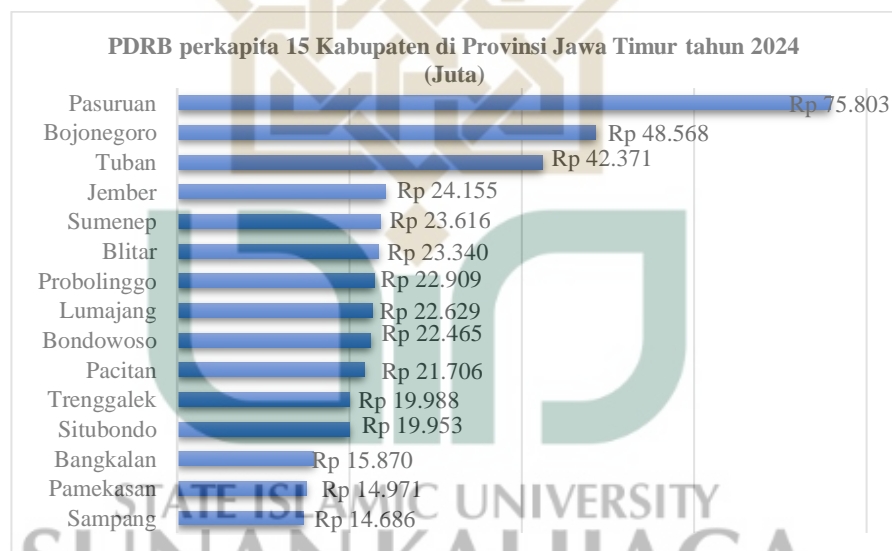
Gambar 1. 5 TPAK 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Gambar 1.5 menunjukkan secara umum sebagian besar kabupaten memiliki capaian TPAK diatas 70% yang menunjukkan keterlibatan penduduk usia kerja pada aktivitas ekonomi. Kabupaten Pacitan mencatat angka tertinggi pada tahun 2024 dengan capaian 86.62%, sedangkan Kabupaten Bangkalan memiliki capaian TPAK terendah yaitu sebesar 70.48%. Perbedaan capaian TPAK tersebut mencerminkan dinamika kesiapan dan keterlibatan penduduk usia kerja pada suatu aktivitas ekonomi, karena perubahan TPAK dapat berpengaruh pada kualitas pembangunan manusia. Saragih & Hasyim (2023) dalam penelitiannya mengatakan Nilai TPAK yang rendah menandakan keterbatasan peluang pekerjaan di suatu wilayah, yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan tingkat pengangguran. Situasi tersebut memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat, karena semakin kecil jumlah individu yang terintegrasi dalam aktivitas ekonomi, semakin menurun pula pendapatan dan taraf hidup mereka. Kondisi ini kemudian membatasi kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan fundamental, seperti pendanaan pendidikan serta akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu (Saragih & Hasyim, 2023).

Salah satu faktor lainnya yang dapat mempengaruhi capaian IPM ialah rata-rata kemampuan ekonomi atau pendapatan masyarakat yang tercermin dalam PDRB perkapita. Dalam Teori Kuznets, Kuznets mengatakan bahwa peningkatan pendapatan perkapita menandakan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, yang kemudian dapat memperbaiki daya beli. Kemampuan masyarakat untuk memperoleh barang-barang merupakan indikator tambahan

dalam menilai IPM dari aspek pendapatan. Peningkatan daya beli masyarakat akan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan IPM (Nugraeni & Aji, 2021). Menurut Rustam & Aisyah (2022) PDRB perkapita yang tinggi akan mendorong peningkatan konsumsi atau kapasitas daya beli masyarakat, yang selanjutnya kebutuhan pokokpun dapat terpenuhi, meningkatkan mutu pendidikan, serta memperoleh akses ke layanan kesehatan yang lebih baik. (Rustam & Aisyah, 2022). Berikut merupakan PDRB perkapita 15 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2024.



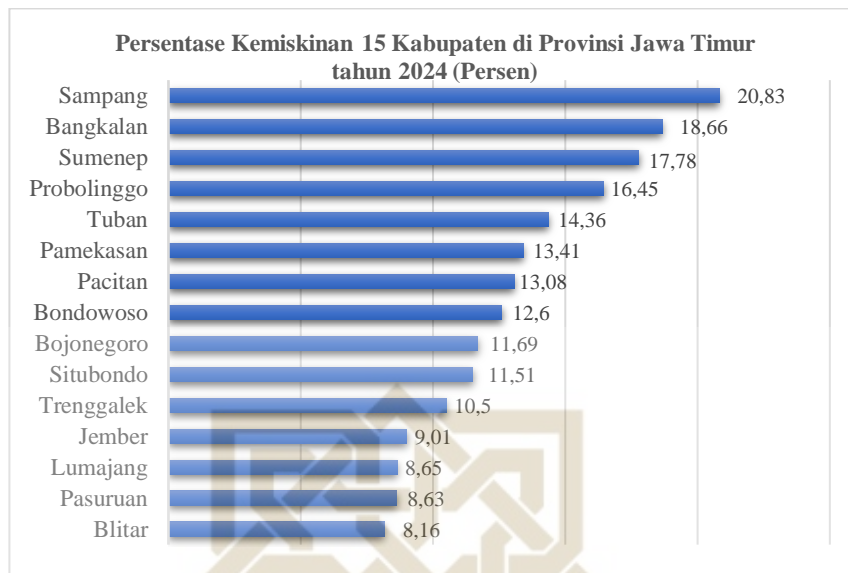
Gambar 1. 6 PDRB perkapita 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada gambar 1.6, PDRB perkapita pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan, Bojonegoro dan Tuban memiliki capaian PDRB perkapita tertinggi. Kabupaten Pasuruan memiliki PDRB perkapita sebesar Rp 75.803 juta, berbanding jauh dengan Kabupaten Sampang yang memiliki PDRB perkapita terendah sebesar Rp 14.686 juta. Perbedaan

PDRB perkapita antarwilayah ini mencerminkan perbedaan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan perkapita dari aktivitas ekonominya. Hidayat & Woyanti (2021) mengatakan ketika pendapatan rata-rata yang diperoleh oleh penduduk meningkat, akan bertambah pula tingkat pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang memadai, mendanai pendidikan, dan memperoleh akses ke layanan kesehatan yang bermutu, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan capaian IPM (Hidayat & Woyanti, 2021).

Sebaliknya, kemiskinan merupakan faktor yang bisa menjadi penghambat peningkatan kualitas hidup penduduk di berbagai daerah, termasuk di daerah-daerah yang tertinggal. Menurut Nurkse (1953) dalam teori lingkaran setan kemiskinan menyatakan bahwa kemiskinan dapat dianggap sebagai rangkaian faktor yang saling berinteraksi, yang menciptakan situasi di mana suatu negara khususnya pada negara berkembang di dunia menghadapi berbagai hambatan dalam upaya mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi (Goni et al., 2022). Pamungkas & Dewi (2022) juga menyebutkan bahwasanya tingkat kemiskinan yang tinggi memberikan dampak negatif terhadap pembangunan manusia, sebab kondisi tersebut muncul dari keterbatasan dan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian, yang mengakibatkan pengabaian terhadap kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan menghalangi individu dalam mengonsumsi nutrisi yang sehat, memperoleh pendidikan yang memadai, serta menikmati lingkungan yang mendukung kehidupan yang layak (Pamungkas & Dewi, 2022). Berikut ini merupakan persentase kemiskinan tahun 2024 pada 15 kabupaten memiliki IPM terendah di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 1. 7 Persentase Kemiskinan 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data BPS Jawa Timur pada gambar 1.7, persentase kemiskinan pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur masih menunjukkan angka yang cukup tinggi dan perlu mendapat perhatian lebih. Kabupaten Sampang tercatat memiliki persentase kemiskinan tertinggi, yaitu sekitar 20,83% dan adapun Kabupaten Blitar memiliki persentase kemiskinan terendah yaitu sekitar 8.16%. Serta rata-rata kemiskinan di 15 kabupaten tersebut berada di angka sekitar 15%. Tingginya tingkat kemiskinan antar kabupaten ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut berpotensi menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat karena keterbatasan ekonomi seringkali membatasi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia melalui penerapan tiga strategi utama, yakni peningkatan pendapatan masyarakat,

pengurangan beban pengeluaran masyarakat, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan (Mulyadi, 2018).

Meskipun Pembangunan terus-menerus diupayakan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai daerah masih menunjukkan kondisi yang belum optimal. Kondisi ini tidak terlepas dari rendahnya daya beli serta ketimpangan ekonomi masyarakat yang secara langsung mempengaruhi pencapaian IPM (BPS, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam menggunakan pendekatan yang komprehensif atau menyeluruh melalui aspek ekonomi dan sosial yang meliputi upah minimum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), PDRB perkapita, serta kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif serta berkeadilan.

Sejumlah penelitian umumnya menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Nisa & Nugroho (2022) yang berfokus pada Provinsi DKI Jakarta, penelian Rohmawati & Hutabarat (2024) yang berfokus pada Provinsi Jawa Tengah, serta penelitian Maulina & Andriani (2020) yang berfokus pada seluruh wilayah Indonesia. Penelitian terdahulu umumnya banyak meneliti pada seluruh provinsi atau kabupaten/kota tanpa memberi perhatian khusus kepada kabupaten-kabupaten yang memiliki capaian IPM terendah. Akibatnya, rekomendasi yang dihasilkan menjadi terlalu umum dan kurang relevan bagi daerah yang benar-benar membutuhkan perhatian khusus.

Penelitian ini memfokuskan pada 15 kabupaten dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia terendah di Provinsi Jawa Timur, karena wilayah-wilayah ini menunjukkan tantangan terbesar dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus. Dengan memperhatikan pentingnya peran IPM sebagai indikator keberhasilan suatu daerah, analisis pada 15 kabupaten ini diharapkan mampu memberikan gambaran lebih jelas mengenai hambatan struktural yang menghambat kemajuan daerah dengan IPM rendah untuk mencapai pembangunan yang merata, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan pembangunan manusia pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Indeks Pembangunan Manusia pada 15 kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2024”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap IPM pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur?

2. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap IPM pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah PDRB Perkapita berpengaruh terhadap IPM pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah Kemiskinan berpengaruh terhadap IPM pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengaruh Upah Minimum terhadap IPM pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menjelaskan pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap IPM pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menjelaskan pengaruh PDRB Perkapita terhadap IPM pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menjelaskan pengaruh Kemiskinan terhadap IPM pada 15 kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam studi ini, uraian penelitian dibagi menjadi beberapa bagian yang disusun secara teratur. Berikut ini adalah rincian sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan secara komprehensif tentang latar belakang permasalahan yang menjadi fondasi penelitian, lengkap juga data

yang memperkuat pentingnya topik yang diangkat, dan juga bab ini juga akan memaparkan rumusan masalah yang meringkas esensi permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian. Bab ini juga menyajikan tujuan penelitian yang mendeskripsikan hasil yang ingin diperoleh. Sebagai penutup bab ini, sistematika penulisan akan diuraikan untuk memberikan pandangan tentang struktur keseluruhan skripsi, sehingga memfasilitasi pembaca dalam memahami urutan penelitian dari permulaan hingga penyelesaian.

BAB II Landasan Teori dan Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang didalamnya berisi konsep-konsep penelitian serta teori-teori yang relevan dalam menjelaskan hubungan tingkat upah minimum, TPAK, PDRB perkapita serta tingkat kemiskinan terhadap variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Teori-teori yang digunakan adalah Teori Upah Efisiensi, Teori Lewis, Teori Kuznets serta Teori Lingkaran Setan Kemiskinan. Pada bab ini juga berisi kajian pustaka yang didalamnya menunjukkan hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat. Penjelasan tersebut digunakan untuk menyusun kerangka penelitian serta merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan jenis metode penelitian yang diterapkan, meliputi rancangan penelitian, populasi serta sampel yang dipilih dalam penelitian, sumber dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis, serta pendekatan pengujian hipotesis. Definisi operasional pada setiap masing-masing variabel baik bebas dan terikat juga disajikan pada bab ini yang digunakan bersama dengan indikator-indikatornya, sehingga

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai variabel-variabel yang dimanfaatkan.

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan, Bab ini merepresentasikan inti utama penelitian yang memaparkan temuan analisis berdasarkan pemrosesan data yang telah diperoleh. Temuan tersebut disampaikan melalui grafik, tabel, serta penjelasan naratif, yang kemudian diinterpretasikan dan dikomparasikan dengan kerangka teori serta hasil penelitian terdahulu. Bab ini berperan penting untuk menjawab rumusan masalah yang telah diformulasikan pada bab pertama. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perspektif baru serta mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang bermanfaat.

BAB V Penutup, pada bab ini menguraikan penjelasan penelitian yang mencakup kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Di samping itu, bab ini menyampaikan rekomendasi yang bersifat praktis dan akademis yang ditujukan kepada pemerintah, pembuat kebijakan, serta peneliti berikutnya yang menjalankan kajian serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan merupakan segala proses untuk meningkatkan segala aspek kehidupan. Keberhasilan pembangunan bukan semata-mata diukur melalui pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana pembangunan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Orientasi pembangunan yang dikemukakan Amartya Sen menempatkan manusia sebagai pelaku utama yang berperan menetapkan tujuan dan mengendalikan proses yang dapat mempengaruhi kehidupannya sebagai inti dari pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Untuk itu, UNDP mengeluarkan suatu indeks yaitu Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator yang mencerminkan keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Melalui analisis data panel dengan menggunakan variabel Upah Minimum, TPAK, PDRB Perkapita serta Kemiskinan terhadap variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia pada 15 kabupaten memiliki IPM terendah di Provinsi Jawa Timur periode 2017-2024, penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah minimum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, yang berarti peningkatan upah minimum dapat mendorong peningkatan IPM pada 15 kabupaten memiliki IPM terendah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini

sejalan dari Teori Upah Effisiensi yang mengatakan bahwasanya upah tidak menimbulkan efek negatif apapun terhadap penyerapan tenaga kerja, karena dengan meningkatnya tingkat upah, para pekerja dapat memenuhi segala kebutuhannya dari standar kehidupan layak.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, yang berarti peningkatan TPAK dapat mendorong peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia pada 15 kabupaten memiliki IPM terendah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan Teori Lewis yang mengatakan bahwa jumlah pekerja yang berlebihan bisa berfungsi sebagai aset utama dalam meningkatkan penghasilan individu, sehingga seseorang lebih mampu untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak.
3. PDRB Perkapita berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia, yang berarti peningkatan PDRB Perkapita dapat mendorong peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia pada 15 kabupaten memiliki IPM terendah di Provinsi Jawa Timur. Temuan tersebut sejalan dengan Teori Kuznets yang mengatakan bahwa pendapatan perkapita yang naik menunjukkan kapasitas ekonomi masyarakat membaik, yang selanjutnya daya belipun juga dapat meningkat, sehingga masyarakat lebih mampu mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak.
4. Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, yang berarti peningkatan kemiskinan dapat menurunkan capaian Indeks Pembangunan Manusia pada 15 kabupaten memiliki IPM terendah di

Provinsi Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan Teori Lingkaran Setan Kemiskinan yang mengatakan bahwa kemiskinan sering kali menciptakan situasi di mana negara-negara, terutama yang sedang berkembang, dihadapkan pada berbagai tantangan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih maju. Karena kemiskinan timbul akibat keterbatasan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mengabaikan pendidikan dan kesehatan.

B. Saran

1. Untuk pemerintah sangat diharapkan dapat memperkuat kebijakan pembangunan manusia melalui optimalisasi faktor ekonomi yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan upah minimum perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses masyarakat terhadap pendidikan serta kesehatan. Selain itu, peningkatan TPAK harus diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan keterampilan. Pemerintah juga perlu mendorong pertumbuhan PDRB perkapita melalui penguatan sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keterkaitan kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan IPM secara berkelanjutan.
2. Bagi masyarakat, pada era saat ini masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai pihak yang menerima keuntungan dari proses pembangunan,

melainkan juga sebagai pelaku kunci dalam implementasinya. Dengan demikian, diharapkan agar masyarakat bisa saling kerja sama dengan pemerintah untuk peningkatan mutu pembangunan, melalui pengembangan kemampuan pribadi serta keterlibatan aktif dalam pengaturan sumber daya alam setempat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anantika, D. A., & Sasana, H. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara APEC. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(3), 167–178. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/31581>
- Andriani, Y., Syafril, S., & Sukmawati, N. (2022). Kemiskinan dalam Naskah Hah Karya Putu Wijaya (Tinjauan Sosiologi Sastra). *Puitika*, 18(1), 72–84. <https://doi.org/10.25077/puitika.18.1.76-88.2022>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga. *Badan Pusat Statistik*. <https://web-api.bps.go.id/download.php?>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia 2023. *Badan Pusat Statistik*, 14(2).
- Badan Pusat Statistik. (2024). Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia 2023. *Badan Pusat Statistik*, 18, 1–282.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks Pembangunan Manusia 2024. *Badan Pusat Statistik*, 19(73), <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE. <https://doi.org/10.1016/j.math.2010.09.003>
- Djirimu, Tombolotutu, & Sading, Y. (2021). Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja di ASEAN Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing. *Jurnal Fisikal Kajian Ekonomi & Keuangan*, 1(2), 15–23. <http://dx.doi.org/10.31685/kek.V4i1.775KajianEkonomi&Keuanganhttps://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournalBagaimanaPeluangPenggunaE-commerce,E>
- Faizin, M. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 214–227. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3027>
- Faujiah, S. A., & Istiandari, D. N. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Gresik Tahun 2004-2023. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, 1(4), 226–236. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i4.297>
- Garnella, R., Wahid, N.A, & Y. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*

Dan Bisnis Islam 1, (1), 21–35.

- Ghozali, I. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika* (2nd ed.). Badan Penerbit-UNDP.
- Goni, N., Bintang, K. J., & Tolosang, D. K. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 121–132.
- Hasibuan, L. S., Rujiman, & Sukardi. (2020). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal UMNAW (Universitas Muslim Nusantara Al Washiya)*, 5(2), 239–250. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.7287>
- Herdiansyah, R. (2011). Pengaruh Pengalaman Kerja dan Tingkat Upah terhadap Produktivitas Kerja Di UD. Farley's Kota Mojokerto. *Jurnal Bisma Fakultas Ekonom*, 1–17.
- Herman. (2018). Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru (2009-2016). *Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 20–24.
- Hidayat, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh PDRB Perkapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan, Kemiskinan dan Teknologi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 23(4), 122–137.
- Imelda, R., Balafif, M., & Wahyuni, S. T. (2021). Pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 1998-2017. *Bharanomics*, 1(2), 67–74. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.155>
- Indarti, S. H. (2017). Pembangunan Indonesia dalam pandangan Amartya Sen. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(1), 35–50.
- Kartika, M., Panca, E., Nina, K., & Wahid, F. D. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 23, 59–71.
- Kiha, E. ., Seran, S., & Seuk, G. (2021). The Effect Of Inflation, Gross Domestic Products And Regional Minimum Wage On Human Development Index Province Of East Nusa Tenggara. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akutansi*, 2(1), 99–106. <http://journal.al-matani.com/index.php/invest/index>
- Kusuma, R., Putri, R., & Hasimi, D. M. (2025). Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten dalam Perspektif Ekonomi Islam tahun 2015-2024. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 272–285.

- Lestari, I. D., & Nilasari, A. (2025). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 483–493.
- Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.199>
- Manatahu, D. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia: Kualitas Ekonomi Indonesia*. Political and Economy News. <https://turkeconom.com/indeks-pembangunan-manusia/>
- Maulina, U., & Andriyani, D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Tpk Terhadap Ipm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(1), 34. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i1.3171>
- Mulyadi, M. (2018). Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan dan Kesenjangan. *Bidang Kesejahteraan Sosial : Info Singkat*, 10(9), 13.
- Nailufar, F., Juliansyah, H., Murtala, & Risna. (2024). Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi Kasus 11 Provinsi IPM Lower Medium). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 7(1), 11–22.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisis Data dengan SPSS-STATA-EVIEWS* (1st ed.). MADENATERA.
- Nugraeni, A. R., & Aji, T. S. (2021). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Ketergantungan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Journal Of Economics*, 1(2), 1–15.
- Nugraha, R. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 101–113.
- Pamungkas, B. D., & Dewi, N. T. (2022). Analisis Determinan yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(3), 293–303.
- Pratama, A., & Ariza, A. (2024). Dampak Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sekadau. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(5), 1338–1350.
- Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). Zifatama Publishing.
- Putri, O. H. (2022). Analisis Pendapatan Perkapita Dan Kesejahteraan Masyarakat

- Terhadap Perekonomian Daerah. *JAN Maha*, 4(8), 68–79. <https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/628>
- Rahmawati, Y., & Hutabarat, R. E. (2025). Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Periode 2015-2023. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5845–5855. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.8543>
- Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1049–1061. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.121>
- Ratih, I. S., & Tamimah. (2021). Indeks Pembangunan Manusia dalam Islam. *Jurnal 1221*, 1(1).
- Ratnasari, G. T., Wibisono, S., & Hanim, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Keresidenan Besuki. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium*, 3(2), 2548–8945.
- Rustam, D., & Aisyah, S. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Sumatera Barat Dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Pundi*, 6(1), 197–208. <https://doi.org/10.31575/jp.v6i1.405>
- Sapaat, T. M., Lopian, A. L. C. P., & Tumangkeng, S. Y. L. T. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun (2005-2019). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 45–56.
- Saragih, V. A., & Hasyim, S. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Serdang Bedagai Analysis of Factors Influencing the Human Development Index in Serdang Bedagai Regency. *TALENTA Conference Series*, 6, 1–6. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v6i1.1663>
- Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi kasus di Kab/Kota Jawa Tengah). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1), 1–12.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2022). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 18–26.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (2nd ed.). ALFABETA CV.
- Suib, M. S. (2017). Sinergitas peran Pondok Pesantren dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 01(02), 171–191.

- Sunarsip. (2025). *Potensi Ekonomi Jawa Timur dan Kontribusi Bank Daerah*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/>
- Sutama, N. I., Astika, S., & Asmini. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(3), 281–291.
- Syofya, H. (2018). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 177–185. <https://doi.org/10.31849/jieb.v15i2.1153>
- Wahyudi, A. (2024). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2022-2023. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 2(2), 8–9.
- Wahyudi, M. Z. (2021). *Ketimpangan Pembangunan Manusia Masih Terjadi*. KOMPAS.Id Amanat Hati Nurani Rakyat. <https://www.kompas.id/artikel/ketimpangan-pembangunan-manusia-masih-terjadi>
- Wandirah, A., & Setyono, J. (2024). Determinan Indeks Pembangunan Manusia Kawasan Timur Indonesia (KTI). *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 3, 61–77. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/jmes/article/download/2231/1187>
- Wibowo, S. A. (2025). Penggunaan EViews dalam Pengujian Data Panel untuk Penelitian Akuntansi: Pendekatan Konseptual dan Aplikatif. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 174–186. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.26898>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews* (5th ed.). STIM YKPN.